RENCANA KERJA

(RENJA)

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2026

DISUSUN OLEH :

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SERUYAN
TAHUN 2025

BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026;

KETIGA : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : PENUTUP.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Juli 2025

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 304 /2025
TANGGAL 29 Juli 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan

NO	PERANGKAT DAERAH
1	*2*
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan
28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan

BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya maka penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dapat diselesaikan walaupun dengan segala keterbatasan baik waktu maupun sumber daya yang terbatas.

Rencana Kerja dimaksud disusun berdasarkan kebutuhan dan perkembangan pembangunan dengan menciptakan suatu kondisi *GOOD GOVERNMENT* dan *CLEAN GOVERNANCE* yang berangkat dari pemikiran dan pertimbangan serta masukan dari berbagai pihak yang mana masukan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan, yang semuanya itu merupakan upaya dalam mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sehingga berhasil mencapai target pembangunan yang sudah menjadi program prioritas.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026, yang telah mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan serta program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Kabupaten Seruyan, dimana untuk sektor perhubungan (transportasi darat, laut dan udara) memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategi bagi pembangunan daerah maupun nasional, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan daerah Kabupaten Seruyan secara umum.

Kami berharap mendapatkan masukan, saran maupun koreksi dan bahkan kritik yang konstruktif dari pihak lain, guna penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan ini.

Kuala Pembuang, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Seruyan,

IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760708 199902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …… i

DAFTAR ISI …… ii

BAB I PENDAHULUAN …… 1

1.1 Latar Belakang …….……..... 1

1.2 Landasan Hukum .....…….……..... 3

1.3 Maksud danTujuan ……..…….... 6

1.4 Sistematika Penulisan ……..…….. 6

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ……. 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ……..... 8

2.2 Analisa Kinerja Pelaksanaan Perangkat Daerah……..... 22

2.3 Isu - isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah …….……. 27

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD……..…….…..... 29

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 46

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH …..……. 42

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……..……..... 58

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah …..……..... 59

3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027..... 60

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ……. 74

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....……..... 74

BAB V PENUTUP …… 102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjujung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala Perangkat Daerah berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja perangkat daerah serta keterkaitan visi, misi Kepala

Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun rencana kerja tahunan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah tersebut yang dikenal dengan Rencana Kerja (RENJA) yaitu dokumen rencana tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seruyan yang telah disusun.

Sektor Perhubungan (Transportasi Darat, Laut dan Udara) secara langsung memiliki kontribusi yang sangat vital dan esensial serta berdimensi stratejik bagi pembangunan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional, mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai jembatan perekat kesenjangan yang membuat semakin penting perannya sebagai bagian integral dari infrastruktur pembangunan Nasional.

Tugas tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung langkah-langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan Kabupaten guna mewujudkan kemajuan di segala bidang, dalam mencapai tujuan Nasional.

Pembangunan sektor Perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian daerah, mengingat kegiatan di bidang transportasi darat, transportasi laut dan transportasi berperan penting dalam kegiatan distribusi barang, penumpang dan jasa informasi ke seluruh pelosok tanah air.

Penataan dan pembinaan tekhnologi informasi secara umum akan dilakukan secara bertahap seiring dengan masuk dan berkembangnya tekhnologi informasi di Kabupaten Seruyan sebagai Kabupaten yang kini menggeliat berkembang Pembangunannya, sumber daya dan sarana yang berkaitan dengan Diseminasi Informasi akan menjadi fokus dalam aplikasi tekhnologi di semua Instansi secara terpadu.

Permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada masing-masing bidang pembangunan Perhubungan akan dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan Perhubungan yang meliputi Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara yang selanjutnya disusun dalam sebuah rencana kerja prioritas program dan kegiatan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Provinsi Kalimantan TengahTahun 2024 Nomor 120);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun

2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);

15. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 21);
16. Keputusan Bupati Seruyan Nomor 100.3.3.2/304/2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Seruyan untuk Tahun 2026 adalah untuk :

1. Mengarahkan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2026 yang sejalan dan selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan tahun 2026;
2. Mengarahkan program, kegiatan dan sub kegiatan agar tetap dan adanya keterkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
3. Mengukur dan menilai kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sebagai sebuah lembaga yang melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bidang perhubungan di Kabupaten Seruyan secara umum, dan kinerja bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan secara khusus.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, pelaksanaan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta hasil rencana program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:

a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2025 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun 2026;
b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah - masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Evaluasi pelaksanaan RENJA-PD Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sampai dengan triwulan ke I tahun 2025, memuat rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel T-C 29 :

Tabel T-C 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian RPD 2026 (akhir periode RENSTRA)	Realisasi target kinerja hasil program, keluaran kegiatan dan Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (tahun n-2)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-1)			program, kegiatan dan Sub Kegiatan RENJA tahun berjalan (tahun n) 2025	Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA sampai dengan tahun berjalan		Ket
									Target RENJA tahun 2024 (tahun n-1)	Realisasi RENJA tahun 2024 (tahun n-1)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program, kegiatan Sub Kegiatan s/d triwulan II tahun 2025	Tingkat capaian realisasi target s/d triwulan II tahun 2025 (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**15**	**01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota**	**Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)**									
2	**15**	**01**	**2.01**		**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**									
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dok	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 dokumen	1	50	Dishub
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dok	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 dokumen	2	100	Dishub
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6 Dok	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100	2 dokumen	-	0	Dishub

2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Lap	15 Lap	5 lap	5 lap	100	5 laporan	5	100	Dishub
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Lap	9 Lap	3 lap	3 lap	100	3 Laporan	1	33	Dishub
2	**15**	**01**	**2.02**		**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**									
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 org/bln	37 org/bln	37 Org/bln	37 Org/bln	100	37 orang/bln	37	100	Dishub
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100	12 dokumen	5	41,66	Dishub
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 laporan	1	100	Dishub
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**									
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100	1 paket	2	66	Dishub
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 orang	6 orang	2 orang	2 orang	100	2 org	1	50	Dishub
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang	12 orang	4 orang	4 orang	100	4 org	2	50	Dishub

2	**15**	**01**	**2.06**		**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**									
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	1 Paket	1 Paket	100	1 paket	1	100	Dishub
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor:	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 paket	9 paket	3 Paket	3 Paket	100	3 paket	2	66	Dishub
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	4 Paket	4 Paket	100	4 paket	2	50	Dishub
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	6 paket	2 Paket	2 Paket	100	2 paket	-	-	Dishub
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 dokumen	1	100	Dishub
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Lap	24 Lap	24 Lap	24 Lap	100	8 laporan	4	50	Dishub
2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**									
2	15	1	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	-	-	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	-	Dishub
2	15	1	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	1 unit	1 unit	100	0 unit	0 unit	-	Dishub
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									

2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Lap	12 Lap	1 Lap	1 Lap	100	12 laporan	6	50	Dishub
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 laporan	5	41,66	Dishub
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	4 laporan	2	50	Dishub
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	100	12 laporan	6	50	Dishub
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**									
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	25 Unit	1 unit	1 unit	100	25 unit	10	40	Dishub
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	4 Unit	4 unit	4 unit	100	4 unit	2		Dishub
	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	-	-	Dishub

2	**15**	**02**			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum**									
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan**									
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	1 dok	1 dok	100	2 Dok	-	-	Dishub
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	-	-	1 dok	1 dok	100	0 Dok	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.02**		**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang diadakan**									
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota dibangun	6 Unit	6 Unit	0 buah	0 buah	-	1 unit	-	-	Dishub
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang terisedia	150 Unit	150 Unit	72 unit	72 unit	100	60 unit	-	-	Dishub
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	35 Unit	35 Unit	-	-	-	12 unit	-	-	Dishub
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 Unit	50 Unit	15 unit	15 unit	100	50 unit	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah dan penyelenggaraan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan**									

2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	1	50	Dishub
2	**15**	**02**	**2.05**		**Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Pengujian berkala kendaraan bermotor yang dilaksanakan**									
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	32 Unit	32 Unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1	100	Dishub
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 Dok	2000 Dok	1 Dok	1 Dok	100	2000 dokumen	-	-	Dishub
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 Unit	9 Unit	9 unit	9 unit	100	9 unit	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.06**		**Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**									
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Unit	12 Unit	2 laporan	1 laporan	50	1 Laporan	1	50	Dishub
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 Dok	2 Dok	-	-	-	1 Dok	1		Dishub

2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	2 laporan	0 laporan	0	2 laporan	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.08**		**Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan yang dilaksanakan**									
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/kota	12 Lap	12 Lap	2 laporan	2 laporan	100	1 laporan	1		Dishub
2	**15**	**02**	**2.09**		**Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang disediakan**									
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Lap	2 Lap	2 unit	2 unit	100	1 Lap	1	50	Dishub
2	**15**	**02**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**									

2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	3 Dok	3 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.13**		**Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**									
2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100	1 Dok	-	-	Dishub
2	**15**	**02**	**2.14**		**Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan**									
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	9 Lap	9 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 laporan	1	33	Dishub

2	**15**	**02**	**2.15**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan**									
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 lap	1	50	Dishub
2	**15**	**03**			**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**									
2	**15**	**03**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**	**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan**									
2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	1 Dok	-	-	-	1 Dok	-	-	Dishub

2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	1 lap	1 lap	100	1 Lap	1	33	Dishub
2	**15**	**03**	**2.05**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**	**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Yang diterbitkan**									
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3 Dok	3 Dok	1 dok	1 dok	100	1 Dok	-	-	Dishub
2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	1 lap	1 lap	100	3 Lap	1	33	Dishub

2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang direncanakan**									
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	3 Lap	3 Lap	1 lap	1 lap	100	1 laporan	1	33	Dishub
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah dokumen perijinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan lokal yang diterbitkan**									
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dok	2 Dok	1 Dok	1 dok	100	1 Dok	1	50	Dishub
2	**15**	**03**	**2.13**		**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**									
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	6 Unit	6 Unit	3 Unit	3 Unit	100	2 unit	-	-	Dishub
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	7 Unit	7 Unit	1 buah	1 buah	100	2 unit	-	-	Dishub

2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	6 Lap	6 Lap	1 Lap	1 Lap	100	1 laporan	-	-	Dishub
2	**15**	**03**	**2.15**		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan**									
2	15	03	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	4 Lap	4 Lap	1 Lap	0 Lap	-	1 Lap	2	50	Dishub
2	15	03	2.15	0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan loka	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	-	-	Dishub

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perhubungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten;
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten;
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten;
7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten;
8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten;
11. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
12. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
13. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
14. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
15. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
16. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;

17. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten;
18. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten;
19. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan
20. Sungai dan Danau sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha;
21. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten;
22. Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha;
23. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten;
24. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
25. Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal;
26. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal;
27. Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau;
28. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal;
29. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
30. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal;
31. Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Disamping sebagai dinas teknis yang merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) berupa Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi jasa tambat labuh / sandar kapal, Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Bongkar Muat, Retribusi Perijinan Dokumen Kapal dan Fasilitas ASD, Retribusi Tanda Masuk.

Target PAD untuk Tahun Anggaran 2025 ditargetkan Rp. 504.050.000,- (Empat Ratus Empat Juta Lima Puluh Ribu Rupiah), sampai dengan bulan Agustus tahun 2025, target PAD yang dibebankan pada Dinas Perhubungan mencapai 76,37 % atau sebesar Rp. 385.281.000,-.

Beberapa permasalahan yang masih memerlukan penyelesaian lebih lanjut seperti diantaranya Masalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Parkir tidak masil belum mencapai target sampai dengan akhir Juni 2025 yang dikarenakan :

a. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kelayakan sarana angkutan.
b. Adanya peraturan perudangan yang sudah melarang penarikan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
b. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keselamatan dijalan/kelaikan kendaraan.
c. Adanya armada milik CV, Koperasi dan PT yang memang tidak mau malakukan Kirk arena tidak adanya penindakan dijalan oleh aparat terkait (penertiban periodic).
d. Masih kurang ketepatan waktu para pengelola parkir untuk menyetorkan kewajibannya sesuai zona yang dikelola ke Kas Daerah.

sehingga berdampak dengan penerimaan retribusi disektor perhubungan.

Adapun Solusi yang diharapkan untuk bisa meningkatkan retribusi sektor pengujian kendaraan bermotor diantaranya :

- Perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti tentang lalu lintas dan keselamatan.

- Dukungan penuh dari Dinas Induk perihal sapras penunjang.
- Bidang terkait dengan retribusi parkin untuk lebih sering lagi menginggatkan para pengelola pada masing-masing zona parker dalam ketepatan menyetorkan kewajibannya ke Kas Daerah dengan menyapaikan bukti penyetoran ke bagian penerimaan Dinas Perhubungan.

Penyelesaian terhadap permasalahan tersebut diharapkan akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yang dibebankan pada Dinas Perhubungan.

Selanjutnya untuk Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel T-C 30 sebagai berikut :

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Seruyan

No.	Indikator *)	SPM Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi	Catatan analisis
				Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2024 (n-2)	Tahun 2025 (n-1)	Tahun 2026 (n)	Tahun 2027 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH											
I.	**ASPEK PELAYANAN UMUM**										
1	Jumlah Terminal Type C /Pelabuhan Laut Dermaga/ Bandara		Unit	102	104	106	102	102	-	-	
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum		Orang	3.750	3.795	3.840	3.784	2.214	-	-	
3	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		Orang	6.896	6.955	7.100	6.905	4.057	-	-	
4	Jumlah uji KIR angkutan umum		Unit	1.700	1.725	1.750	1.703	1.006	-	-	
5	Prosentase Layanan Angkutan Darat		Persen	0,70	0,75	1,80	0,71	0,71	-	-	
6	Pemasangan Rambu-rambu		Unit	300	325	350	349	349	-	-	
7	Rasio ijin trayek		Persen	0.000020	0.000021	0.000022	0.000020	0.000020	-	-	
8	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum		Persen	40,20	50,20	50,50	40,24	40,24	-	-	
9	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan		Persen	0,03	0,035	0,040	0,031	0,031	-	-	
10	Jumlah orang/barang melalui Bandara/Dermaga/Treminal per tahun		Orang/ Barang	10.646	10.750	10.940	10.689	6.271	-	-	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SOPD

Beberapa hal yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Pengelolaan Pelayaran

Isu-isu strategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Bidang Transportasi Jalan dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang tentunya juga menunjang terhadap visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan periode 2024-2026, adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan pengembangan UPTD Terminal di Wilayah Kabupaten Seruyan sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang refresentatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan;
2. Pengoperasian Pelabuhan Laut Teluk Segintung;
3. Pemeliharaan Fasilitas Perhubungan Laut, Sungai dan Penyeberangan;
5. Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan angkutan laut, sungai dan penyeberangan.
6. Pengembangan transportasi angkutan sungai untuk membuka keterisolasian daerah terpencil;
7. Perlunya Peremajaan Warning Light di Kabupaten Seruyan dengan menggunakan system *Area Traffic Control System (ATCS)*;.
8. Melakukan survey data terbaru untuk pemuktahiran data dalam meningkatkan validasi data.

2.3.2 Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Isu-isustrategis yang saat ini berkembang sesuai dengan tugas pokok Bidang Lalu Lintas dan Angkutan guna mendukung terhadap visi dan misi Bupati Kabupaten Seruyan periode 2025-2029, adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan dan pengendalian perpakiran dalam wilayah Kota Kuala Pembuang dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pengguna jasa perparkiran;
2. Melakukan kajian dan mengimplementasikan transportasi jalan dan udara yang saling berintegrasi (*integrated transportation system*) dalam rangka menarik minat masyarakat Kabupaten Seruyan dan sekitarnya untuk kembali menghidupkan transportasi sungai;
3. Mengoperasikan angkutan massal dengan wilayah operasi Kecamatan Seruyan Hilir, Kecamatan Seruyan Hilir Timur dan sekitarnya;
4. Membuka rute angkutan sekolah yang berjenjang pada jalan-jalan kawasan pemukiman yang belum dilayani angkutan kota dan lokasi lain dalam Wilayah Kabupaten Seruyan.
5. Peningkatan pengadaan alat uji di UPTD Balai Uji untuk meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kodisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;
6. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan baik pada angkutan jalan maupun angkutan udara.
7. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir, perizinan trayek angkutan liar,

uji kendaraan bermotor, surat keterangan angkut dan rekomendasi angkut serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan;

Berdasarkan isu-isu strategis dari masing-masing bidang diatas, maka dapat dihimpun isu-isu staregis berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi SOPD Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan, yaitu sebagai berikut :

1. Keterisolasian Kecamatan dan Desa dari Akses Transportasi;
2. Belum lancarnya arus orang, barang dan jasa hingga ke pelosok desa;
3. Tersedianya infrastruktur alam berupa sungai besar yang membentang dan membelah wilayah Kabupaten Seruyan dari Utara ke Selatan/ dari hulu ke hilir, dan banyaknya anak-anak sungai kecil yang potensial sebagai sumber kehidupan masyarakat;
4. Kebiasaan Masyarakat Seruyan yang bermukim di pinggir sungai;
5. Belum optimalnya pemanfaatan Prasarana dan Sarana Balai Uji dan Terminal serta Dermaga / Pelabuhan yang ada;
6. Masih terbatasnya Rambu - Rambu dan Marka Jalan untuk keselamatan transportasi jalan darat, sungai, danau dan laut;
7. Masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran Rambu - Rambu Lalu lintas.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 disajikan pada tabel T-C.31 , antara lain memuat :

1. Program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
2. Hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam rancangan awal RKPD. Jika belum termuat, maka perlu dibuatkan catatan penting;
4. Identifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
5. Untuk Jenis program dan kegiatan serta indikator kinerjanya telah sesuai, maka besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian renstra perangkat daerah, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan memberikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah.
6. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), yaitu :

   Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam rancangan awal RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis,lakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra Perangkat Daerah, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;tentukan indikator yang akan dipilih;tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan awal RKPD, target capaian Renstra Perangkat Daerah, serta ketersediaan sumber dana lainnya;Berikan catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah.
7. Rumusan kebutuhan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator

kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan; dan

8. Identifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel T-C.31.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026

Kabupaten Seruyan

Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan				
					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
					DINAS PERHUBUNGAN					DINAS PERHUBUNGAN				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**6.474.003.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)**	**100%**	**6.774.003.000**
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**51.470.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**51.470.000**
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.930.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	16.930.000

2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	4.500.000
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 dokumen	4.500.000
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	12.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	12.000.000,00
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	13.540.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	13.540.000
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**4.284.755.906**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**4.584.755.906**
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bln	4.106.220.906	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 orang/bln	4.406.220.906
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	162.495.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	162.495.000
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	1 laporan	16.040.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	16.040.000

							Tahun SKPD							
2	**1 5**	**0 1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**183.014.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**183.014.000**
2	1 5	0 1	2.05	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 paket	75.000.000
2	1 5	0 1	2.05	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Seruyan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	55.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Seruyan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 org	55.200.000
2	1 5	0 1	2.05	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 org	52.814.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 org	52.814.000
2	**1 5**	**0 1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**672.192.400**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**	**100%**	**672.192.400**
2	1 5	0 1	2.06	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.125.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.125.000,00
2	1 5	0 1	2.06	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	96.324.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	96.324.000
2	1 5	0 1	2.06	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	150.745.400	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	150.745.400

2	1 5	0 1	2.06	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	38.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Seruyan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	38.000.000
2	1 5	0 1	2.06	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokume n	11.998.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokume n	11.998.000
2	1 5	0 1	2.06	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	370.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 laporan	370.000.000
2	**1 5**	**0 1**	**#### #**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**90.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**90.000.000**
2	1 5	0 1	#### #	000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	15.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	1 unit	15.000.000
2	1 5	0 1	#### #	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	75.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	75.000.000
2	**1 5**	**0 1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**865.349.944**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**865.349.944**
2	1 5	0 1	2.08	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.388.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12.388.000
2	1 5	0 1	2.08	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	141.710.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	141.710.000

2	1 5	0 1	2.08	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	34.710.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 laporan	34.710.000
2	1 5	0 1	2.08	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	676.541.944	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	676.541.944
2	**1 5**	**0 1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**327.220.750**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**327.220.750**
2	1 5	0 1	2.09	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	49.990.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 unit	49.990.000
2	1 5	0 1	2.09	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	230.030.750	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Seruyan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 unit	230.030.750
2	1 5	0 1	2.09	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	47.200.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Seruyan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	47.200.000
2	**1 5**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum**	**3750 0rang**	**800.594.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**		**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum**	**3750 0rang**	**890.594.000**

2	**1 5**	**0 2**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan**	**100%**	**107.505.000**	**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**		**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan**	**100%**	**127.505.000**
2	1 5	0 2	2.01	000 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Lap	7.505.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Lap	7.505.000
2	1 5	0 2	2.01	000 5	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	100.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	1 laporan	120.000.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase perlengkapan jalan yang disediakan**	**100%**	**390.868.000**	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase perlengkapan jalan yang disediakan**	**100%**	**390.868.000**
2	1 5	0 2	2.02	000 1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	50.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	50.000.000
2	1 5	0 2	2.02	000 2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 unit	250.868.000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	60 unit	250.868.000
2	1 5	0 2	2.02	000 3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Seruyan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 unit	30.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Kab. Seruyan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	12 unit	30.000.000
2	1 5	0 2	2.02	000 4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 unit	60.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	50 unit	60.000.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**	**10**	**7.505.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**		**Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**	**10**	**27.505.000**

2	1 5	0 2	2.04	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	27.505.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan**	**10 unit**	**214.306.000**	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**		**Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan**	**10 unit**	**264.306.000**
2	1 5	0 2	2.05	000 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	35.245.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 unit	85.245.000
2	1 5	0 2	2.05	000 4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 dokumen	60.907.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2000 dokumen	60.907.000
2	1 5	0 2	2.05	000 7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	118.154.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9 unit	118.154.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100%**	**35.380.000**	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100%**	**35.380.000**
2	1 5	0 2	2.06	000 4	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 unit	7.505.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	1 unit	7.505.000

2	1 5	0 2	2.06	001 4	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dok	7.505.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dok	7.505.000
2	1 5	0 2	2.06	001 5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	20.370.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2 laporan	20.370.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti**	**100%**	**7.505.000**	**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**		**Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 2	2.08	000 4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.09**		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kotayang disediakan**	**100%**	**7.505.000**	**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum Persentase Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kotayang disediakan**	**100%**	**7.505.000**

2	1 5	0 2	2.09	000 2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Lap	7.505.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 Lap	7.505.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**	**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 2	2.11	000 1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokt	7.505.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokt	7.505.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.13**		**Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**	**Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 2	2.13	000 1	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	7.505.000	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dok	7.505.000

2	**1 5**	**0 2**	**2.14**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan**	**100%**	**7.505.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten yang diterbitkan**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 2	2.14	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000
2	**1 5**	**0 2**	**2.15**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 2	2.15	000 4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000
2	**1 5**	**0 3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**	**100%**	**718.471.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**		**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**	**100%**	**718.471.000**

2	**1 5**	**0 3**	**2.03**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**		**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha**		**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**
2	1 5	0 3	2.03	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	7.505.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	7.505.000
2	1 5	0 3	2.03	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Lap	7.505.000

2	**1 5**	**0 3**	**2.05**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**		**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**	**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**		**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**
2	1 5	0 3	2.05	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	7.505.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dok	7.505.000
2	1 5	0 3	2.05	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lap	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Lap	7.505.000

2	**1 5**	**0 3**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki persetujuan pengoperasian**	**100%**	**7.505.000**	**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**		**Persentase Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki persetujuan pengoperasian**	**100%**	**7.505.000**
2	1 5	0 3	2.07	000 4	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	7.505.000
2	**1 5**	**0 3**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**Jumlah Dokumen perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal yang diterbitkan**	**2 Dok**	**7.505.000**	**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**Jumlah Dokumen perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal yang diterbitkan**	**2 Dok**	**7.505.000**
2	1 5	0 3	2.12	000 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dok	7.505.000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dok	7.505.000
2	**1 5**	**0 3**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**	**100%**	**658.431.000**	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**		**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**	**100%**	**1.358.431.000**

2	1 5	0 3	2.13	000 2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 unit	400.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	2 unit	900.000.000
2	1 5	0 3	2.13	000 3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 unit	250.926.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 unit	250.926.000
2	1 5	0 3	2.13	001 0	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 laporan	7.505.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 laporan	7.505.000
2	**1 5**	**0 3**	**2.15**		**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**	**Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**		**Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan**	**100%**	**15.010.000**
2	1 5	0 3	2.15	000 2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Lap	7.505.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Lap	7.505.000
2	1 5	0 3	2.15	000 3	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 unit	7.505.000	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 unit	7.505.000
								TOTAL	**7.993.068.000**				**TOTAL**	**9.083.068.000**

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32.

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Kabupaten Seruyan

Nama SKPD : Dinas Perhubungan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*
I.	**PERHUBUNGAN**				
1.	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**		**Jumlah orang yang terangkut angkutan umum**	**3.840 Orang**	
1.1	Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Persentase perlengkapan jalan yang diadakan	**100 %**	
1.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Prasarana Jalan diJalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 unit	Prioritas pembangunan
1.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	57 unit	Prioritas pembangunan
1.2	Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kab. Seruyan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang disediakan	**100 %**	
1.2.1	*Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	Kab. Seruyan	Juamlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 kk	

1.3	Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Persentase Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan	**100 %**	
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	KAb. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	1 buah	Prioritas pembangunan
1.3.2	Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Kartu Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang didakan	2000 Dok	
1.3.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	9 buah	Prioritas pembangunan
2	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**Kab. Seruyan**	**Persentase penyelengaraan pelayaran yang dikelola**	**100 %**	
2.1	**Kegiatan Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Kab. Seruyan**	**Persentase Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang dilaksanakan**	**100 %**	
2.1.1	Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	2 unit	Prioritas pembangunan
2.1.2	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Kab. Seruyan	Jumlah Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 unit	Prioritas pembangunan
2.2	**Kegiatan Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Kab. Seruyan**	**Persentase Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang diterbitkan**	**100 %**	
2.2.1	Sub Kegiatan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Kab. Seruyan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	1 unit	Prioritas pembangunan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, maupun yang dirumuskan dalam RKP (rancangan awal). Disamping itu juga perlu penelaahan mengenai pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD yang direncanakan.

Yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yg terkait dengan pembangunan daerah provinsi, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota, yang perlu dicermati adalah prioritasdan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana, yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten/kota.

Untuk penyusunan RKPD kabupaten/kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan Nasional. Tahap ini menguraikan kebijakan Nasional berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di Indonesia. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMN Nasional penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD kabupaten/ kota yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Untuk menjaga kesinambungan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah, Penyusunan RKPD berpedoman pada Arah Kebijakan dan Sasaran pada RPD Kabupaten dan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN untuk keselarasan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan Pembangunan Daerah Provinsi dan Nasional.

Rumusan Tujuan dan Sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan Strategi Pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi. Tujuan pembangunan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut:

1). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya ketimpangan pendapatan;
2). Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana prasarana infrastruktur;

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Seruyan, maka dirumuskan tujuan pembangunan di bidang perhubungan untuk tahun 2026 sebagai berikut :

1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi;

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1) Meningkanya kuantitas dan Kualitas sarana dan prasarana Transportasi;

3.3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027.

Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahan 2026 serta hasil pemetaan dapat dilihat pada tabel 3.3 :

TABEL 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2026 PERKIRAAN MAJU 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN			**100%**	**10.429.707.234**					**100%**	**10.733.145.545**	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**100%**	**7.839.198.781**					**100%**	**8.142.637.092**	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**100%**	**7.839.198.781**					**100%**	**8.142.637.092**	
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN-TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)**		**100%**	**6.451.992.781**					**100%**	**6.751.550.592**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**51.470.000**					**100%**	**51.470.000**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	2 dokumen	16.930.000	APBD II				2 dokumen	16.930.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	4.500.000	APBD II				2 dokumen	4.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	4.500.000	APBD II				2 dokumen	4.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	5 laporan	12.000.000,00	APBD II				5 laporan	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	3 Laporan	13.540.000	APBD II				3 Laporan	13.540.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	4.391.724.968					100%	5.074.272.560	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	37 orang/bln	4.294.456.968	APBD II				37 orang/bln	4.977.004.560	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelak-sanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	12 dokumen	95.018.000	APBD II				12 dokumen	95.018.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	1 laporan	2.250.000	APBD II				1 laporan	2.250.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan		100%	131.415.781					100%	138.426.000	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	1 paket	67.200.000	APBD II				1 paket	67.200.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	2 org	40.643.781	APBD II				2 org	47.654.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	2 org	23.572.000	APBD II				2 org	23.572.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan		100%	664.212.250					100%	624.212.250	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 paket	5.125.000,00	APBD II				1 paket	5.125.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 paket	96.324.000	APBD II				3 paket	96.324.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 paket	143.839.250	APBD II				4 paket	103.839.250	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	2 paket	38.000.000	APBD II				2 paket	38.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 dokumen	11.998.000	APBD II				1 dokumen	11.998.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	8 laporan	368.926.000	APBD II				8 laporan	368.926.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**-**					**100%**	**100.000.000**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kab. Seruyan	1 unit	-					3 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 unit	-					1 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	869.069.782					100%	469.069.782	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 laporan	12.388.000	APBD II				12 laporan	12.388.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	113.205.560	APBD II				12 laporan	113.205.560	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 laporan	34.710.000	APBD II				12 laporan	34.710.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	708.766.222	APBD II				12 laporan	308.766.222	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**344.100.000**					**100%**	**294.100.000**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	1 unit	49.990.000	APBD II				1 unit	39.990.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Seruyan	4 unit	246.910.000	APBD II				4 unit	206.910.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0004	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 unit	47.200.000	APBD II				1 unit	47.200.000	Dinas Perhubungan

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Darat		100%	284.306.000					100%	174.306.000	
						Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idial		100%	3.061.480.453					100%	3.182.941.953	
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan		100%	50.000.000					100%	100.376.000	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	15.000.000	APBD II				1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	15.000.000	APBD II				1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	-	-	APBD II				1 Dokumen	50.376.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	50.000.000					1 Dokumen	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase perlengkapan jalan yang disediakan		100%	2.914.398.453					100%	2.800.508.453	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	2 unit	92.495.000	APBD II				1 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan

2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	60 unit	2.740.508.453	APBD II				40 unit	2.690.508.453	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	12 unit	51.395.000	APBD II				12 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	18 unit	30.000.000	APBD II				18 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan		100%	7.505.000					100%	75.000.000	
2	15	02	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	1 Dokumen	7.505.000	APBD II				12 Dokumen	75.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan		10 unit	284.306.000					10 unit	174.306.000	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Seruyan	1 unit	45.245.000	APBD II				1 unit	35.245.000	Dinas Perhubungan

2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	1500 dokumen	60.907.000	APBD II				1500 dokumen	60.907.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Seruyan	9 unit	178.154.000	APBD II				9 unit	78.154.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	82.072.000					100%	111.670.000	
2	15	02	2.06	11	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Seruyan	2 orang	44.000.000	APBD II				2 orang	48.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dok	10.702.000	APBD II				2 Dok	36.300.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 laporan	27.370.000	APBD II				2 laporan	27.370.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti		100%	7.505.000					100%	31.220.000	

2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 laporan	7.505.000	APBD II				2 laporan	31.220.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.10**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Angkutan kawasan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**					**100%**	**32.947.500**	
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	-	-	APBD II				1 Dokumen	32.947.500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.15**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan**		**100%**	**-**					**100%**	**31.220.000**	
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan PerolehanIzin Penyelenggaraan Angkutan Taksitidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah PersetujuanIzin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kotadalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra secara	Kab. Seruyan	Dokumen	-	APBD II				2 Dokumen	15.610.000	Dinas Perhubungan

2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	laporan	-	APBD II				2 laporan	15.610.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**		**100%**	**631.928.000**					**100%**	**624.347.000**	
2	**15**	**03**	**2.05**		**Penerbitan Izin Usaha Penyeleng-garaan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**	**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan**		**100%**	**15.010.000**					**100%**	**25.898.000**	
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenu-han Persyaratan Pero lehan Izin Usaha Penyeleng-garaan Angkutan Penyebe rangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewe nangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terinteg rasi Secara Elektroni	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	1 Dok	7.505.000	APBD II				1 Dok	12.949.000	Dinas Perhubungan

2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Lap	7.505.000	APBD II				1 Lap	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki persetujuan pengoperasian**		**100%**	**10.982.000**					**100%**	**13.300.000**	
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/kot	Kab. Seruyan	1 laporan	10.982.000	APBD II				1 laporan	13.300.000	Dinas Perhubungan

2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal yang diterbitkan**		**100%**	**30.020.000**					**100%**	**51.047.000**	
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	1 Dok	7.505.000	APBD II				1 Dok	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal.	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab. Seruyan	1 unit	7.505.000	APBD II				1 unit	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	1 unit	7.505.000	APBD II				1 unit	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	1 lap	7.505.000	APBD II				1 lap	12.200.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**		**100%**	**575.916.000**					**100%**	**534.102.000**	
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kab. Seruyan	2 unit	384.990.000	APBD II				2 unit	334.102.000	Dinas Perhubungan

2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	2 unit	190.926.000	APBD II				2 unit	200.000.000	Dinas Perhubungan
								TOTAL	10.429.707.234					TOTAL	10.733.145.545	

BAB IV

PERENCANAAN KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu**.**

Sedangkan kegiatan merupakan upaya-upaya untuk mengaplikasikan semua program yang telah direncanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan menetapkan program dan kegiatannya sebagai berikut :

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

   Misal:

   - Pencapaian Tujuan dan Sasaran daerah,
   - Pencapaian SDGs,
   - Pengentasan kemiskinan,
   - Pencapaian NSPK dan SPM,
   - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
   - Pengembangan daerah terisolir,
   - Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

   - Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan pada tahun 2026 sebayak 3 progran, 19 kegiatan dan 53 sub kegitan

- Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
- Adapun perkiraan Total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah sebesar Rp. 10.429.707.234,00 yang pendanaannya sumber dari APBD Kabupaten Seruyan.

c. Bila mana dalam berjalanannya penyusunan rencana kerja terjadi perumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya, maka akan dilakukan penyesuaian kembali penyusunan rencana kerja dengan mempedomani RKPD yang telah ditetapkan.

d. Program dan kegiatan serta sub kegiatanyang akan dituangkan dalam renja.

Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan ini secara terperinci memuat nama program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan, target capaian kinerja dan kebutuhan dana / pagu indikatif serta sumber dana pada tahun rencana.

Daftar rencana program dan kegiatan serta sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2026 disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan serta sub kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan Tahun 2026 untuk Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal) serta Prakiraan Maju Tahun 2027 sebagaimana dalam tabel 4.1.

TABEL. 4.1

MATRIK PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2026 PERKIRAAN MAJU 2027

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026 (Tahun Rencana)						Kelompok sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Prioritas			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
											Nasional	Daerah				
					DINAS PERHUBUNGAN											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
2	**15**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)**		**100%**	**6.451.992.781**					**100%**	**6.751.550.592**	
2	**15**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**51.470.000**					**100%**	**51.470.000**	
2	15	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	2 dokumen	16.930.000	APBD II				2 dokumen	16.930.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	4.500.000	APBD II				2 dokumen	4.500.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Seruyan	2 dokumen	4.500.000	APBD II				2 dokumen	4.500.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Seruyan	5 laporan	12.000.000,00	APBD II				5 laporan	12.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Seruyan	3 Laporan	13.540.000	APBD II				3 Laporan	13.540.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pesentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**4.391.724.968**					**100%**	**5.074.272.560**	
2	15	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Seruyan	37 orang/bln	4.294.456.968	APBD II				37 orang/bln	4.977.004.560	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Seruyan	12 dokumen	95.018.000	APBD II				12 dokumen	95.018.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Seruyan	1 laporan	2.250.000	APBD II				1 laporan	2.250.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**131.415.781**					**100%**	**138.426.000**	
2	15	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Seruyan	1 paket	67.200.000	APBD II				1 paket	67.200.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Seruyan	2 org	40.643.781	APBD II				2 org	47.654.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Seruyan	2 org	23.572.000	APBD II				2 org	23.572.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan**		**100%**	**664.212.250**					**100%**	**624.212.250**	
2	15	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 paket	5.125.000,00	APBD II				1 paket	5.125.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	3 paket	96.324.000	APBD II				3 paket	96.324.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 paket	143.839.250	APBD II				4 paket	103.839.250	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Seruyan	2 paket	38.000.000	APBD II				2 paket	38.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 dokumen	11.998.000	APBD II				1 dokumen	11.998.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Seruyan	8 laporan	368.926.000	APBD II				8 laporan	368.926.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100%**	**-**					**100%**	**100.000.000**	
2	15	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kab. Seruyan	1 unit	-					3 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Seruyan	1 unit	-					1 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**869.069.782**					**100%**	**469.069.782**	
2	15	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Seruyan	12 laporan	12.388.000	APBD II				12 laporan	12.388.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	113.205.560	APBD II				12 laporan	113.205.560	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	4 laporan	34.710.000	APBD II				12 laporan	34.710.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Seruyan	12 laporan	708.766.222	APBD II				12 laporan	308.766.222	Dinas Perhubungan
2	**15**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**344.100.000**					**100%**	**294.100.000**	
2	15	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Seruyan	1 unit	49.990.000	APBD II				1 unit	39.990.000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Seruyan	4 unit	246.910.000	APBD II				4 unit	206.910.000	Dinas Perhubungan

2	15	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Seruyan	1 unit	47.200.000	APBD II				1 unit	47.200.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Konektivitas Darat**		**100%**	**284.306.000**					**100%**	**174.306.000**	
						Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Idial		**100%**	**3.061.480.453**					**100%**	**3.182.941.953**	
2	**15**	**02**	**2.01**		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten Yang Ditetapkan**		**100%**	**50.000.000**					**100%**	**100.376.000**	
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	15.000.000	APBD II				1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	15.000.000	APBD II				1 Dokumen	15.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	-	-	APBD II				1 Dokumen	20.376.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dokumen	20.000.000					1 Dokumen	50.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase perlengkapan jalan yang disediakan**		**100%**	**2.914.398.453**					**100%**	**2.800.508.453**	
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Kab. Seruyan	2 unit	92.495.000	APBD II				1 unit	50.000.000	Dinas Perhubungan

2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Seruyan	60 unit	2.740.508.453	APBD II				40 unit	2.690.508.453	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	12 unit	51.395.000	APBD II				12 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	18 unit	30.000.000	APBD II				18 unit	30.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	**Jumlah dan Penyelenggaraan Pembangunan Fasilitas Parkir yang diterbitkan**		**100%**	**7.505.000**					**100%**	**75.000.000**	
2	15	02	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	1 Dokumen	7.505.000	APBD II				12 Dokumen	75.000.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan**		**10 unit**	**284.306.000**					**10 unit**	**174.306.000**	
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kab. Seruyan	1 unit	45.245.000	APBD II				1 unit	35.245.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Seruyan	1500 dokumen	60.907.000	APBD II				1500 dokumen	60.907.000	Dinas Perhubungan

2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Kab. Seruyan	9 unit	178.154.000	APBD II				9 unit	78.154.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Hasil Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**		**100%**	**82.072.000**					**100%**	**111.670.000**	
2	15	02	2.06	11	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Seruyan	2 orang	44.000.000	APBD II				2 orang	48.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Dok	10.702.000	APBD II				2 Dok	36.300.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	2 laporan	27.370.000	APBD II				2 laporan	27.370.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Persentase Hasil Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ yang ditindaklanjuti**		**100%**	**7.505.000**					**100%**	**31.220.000**	
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 laporan	7.505.000	APBD II				2 laporan	31.220.000	Dinas Perhubungan

2	**15**	**02**	**2.10**		**Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pelayanan Angkutan kawasan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**		**-**	**-**					**100%**	**32.947.500**	
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	-	-	APBD II				1 Dokumen	32.947.500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**02**	**2.15**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten Yang Ditetapkan**		**100%**	**-**					**100%**	**31.220.000**	
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan PerolehanIzin Penyelenggaraan Angkutan Taksitidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem	Jumlah PersetujuanIzin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kotadalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegra secara	Kab. Seruyan	Dokumen	-	APBD II				2 Dokumen	15.610.000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	laporan	-	APBD II				2 laporan	15.610.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**	**Konektivitas Laut / Sungai**		**100%**	**631.928.000**					**100%**	**624.347.000**	

2	**15**	**03**	**2.05**		**Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha**	**Persentase Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha yang diterbitkan**		**100%**	**15.010.000**					**100%**	**25.898.000**	
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Seruyan	1 Dok	7.505.000	APBD II				1 Dok	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 Lap	7.505.000	APBD II				1 Lap	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**2.07**		**Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki persetujuan pengoperasian**		**100%**	**10.982.000**					**100%**	**13.300.000**	

2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Seruyan	1 laporan	10.982.000	APBD II				1 laporan	13.300.000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**03**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**	**Jumlah Dokumen perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Lokal yang diterbitkan**		**100%**	**30.020.000**					**100%**	**51.047.000**	
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan	Kab. Seruyan	1 Dok	7.505.000	APBD II				1 Dok	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Kab. Seruyan	1 Unit	7.505.000	APBD II				1 Unit	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	1 Unit	7.505.000	APBD II				1 Unit	12.949.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Kab. Seruyan	1 lap	7.505.000	APBD II				1 lap	12.200.000	Dinas Perhubungan

2	**15**	**03**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**	**Persentase Pelabuhan Sungai dan Danau yang berizin dan beroperasi**		**100%**	**575.916.000**					**100%**	**534.102.000**	
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Kab. Seruyan	2 unit	384.990.000	APBD II				2 unit	334.102.000	Dinas Perhubungan
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Kab. Seruyan	2 unit	190.926.000	APBD II				2 unit	200.000.000	Dinas Perhubungan
								TOTAL	**10.429.707.234**					**TOTAL**	**10.733.145.545**	

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan yang berisi prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran tujuan dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergitas dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini juga salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan selama Tahun 2026, dan sebagai pengukur capaian kinerja organisasi secara tim, individu maupun institusi wadah organisasi. Disamping itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mencapai tujuan dan sasaran Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang professional, bersih dan berwibawa serta sebagai pelayan masyarakat yang terbaik.

Namun demikian, dukungan semua pihak (stakeholder) di Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan Rencana Kerja tersebut kedepan tetap dibutuhkan guna mencapai hasil yang lebih optimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kuala Pembuang, 31 Juli 2025

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Seruyan,

IDHAM BW KUSUMAH, SE, MSM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760708 199902 1 001